MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon: (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 3505193
Laman: *https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id*

SURAT TUGAS
Nomor : 162 /DjMT/Ratgas/KP.01.3/VII/2022

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Zona Integritas ke satker, perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan tersebut di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 280/DjMT/KEP/OT.01/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Penetapan Tim Pendampingan Zona Integritas ke Satuan Kerja di Lingkungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Nama : Marsekal Pertama TNI Edi Wuryanto, S.IP., C.Fr.A
   NIP : 513166
   Pangkat : MARSEKAL PERTAMA TNI (Marsma TNI)
   Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Ditjen Badimiltun
2. Nama : Raden Junida Hasta Kusumah, S.H.I., M.H.
   NIP : 197806082000121002
   Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen Badimiltun
3. Nama : Meylan, S.Sos.,M.M.
   NIP : 197905112009122003
   Pangkat : Penata (III/c)
   Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola TUN

Untuk :

1. Melaksanakan tugas untuk Kegiatan Pendampingan Zona Integritas ke Satuan Kerja di Lingkungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bertempat di Pengadilan Militer I - 04 Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 sd. 12 Agustus 2022;
2. Segala biaya dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA-005.05.1.663122/2022 Tahun Anggaran 2022 Tanggal 17 November 2021;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Lutfik Tri Cahyaningrum